



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 7

7.1 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan:

- 1) Penerimaan retribusi pajak, alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan di mana retribusi pajak tersebut dipungut.
- 2) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas di mana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- 3) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pegawai pemerintahan daerah.
- 4) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- 5) Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Tabel berikut menyajikan kerangka pendanaan daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 - 2026..

Tabel 7.1. Proyeksi Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 – 2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai	346.804.655.860	355.474.772.257	364.361.641.563	373.470.682.602	382.807.449.667
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	282.440.698.228	273.967.477.281	265.748.452.963	257.775.999.374	250.042.719.393
2.1.3	Bunga					
2.1.4	Subsidi					
2.1.5	Hibah	5.886.037.000	6.180.338.850	6.489.355.793	6.813.823.582	7.154.514.761
2.1.6	Bantuan Sosial	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000	732.050.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	635.631.391.088	636.172.588.388	637.204.450.318	638.726.005.558	640.736.733.821
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Modal Tanah	820.954.000	1.231.431.000	1.847.146.500	2.770.719.750	4.156.079.625
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.087.868.399	46.164.353.663	44.317.779.517	43.874.601.721	43.435.855.704
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.352.892.177	81.220.536.786	85.281.563.625	89.545.641.806	94.022.923.897
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.055.427.692	79.858.199.077	83.851.109.030	88.043.664.482	92.445.847.706
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.514.430.600	2.388.709.070	2.269.273.617	2.155.809.936	2.048.019.439
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya					
	JUMLAH BELANJA MODAL	204.831.572.868	210.863.229.595	217.566.872.289	226.390.437.695	236.108.726.371
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.522.609.044	6.074.869.948	6.682.356.943	7.350.592.638	8.085.651.901
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.522.609.044	6.074.869.948	6.682.356.943	7.350.592.638	8.085.651.901
	JUMLAH BELANJA	845.985.573.000	853.110.687.932	861.453.679.550	872.467.035.891	884.931.112.093
3	TRANSFER					
3.1	Transfer Bantuan Keuangan					
3.1.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					
3.1.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	104.430.662.700	107.041.429.268	109.717.464.999	112.460.401.624	115.271.911.665
3.1.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					
	Jumlah Tansfer Bantuan Keuangan	104.430.662.700	107.041.429.268	109.717.464.999	112.460.401.624	115.271.911.665
	JUMLAH TRANSFER	104.430.662.700	107.041.429.268	109.717.464.999	112.460.401.624	115.271.911.665
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	950.416.235.700	960.152.117.199	971.171.144.549	984.927.437.515	1.000.203.023.758

Sumber data : BPKAD Kota Tidore Kepulauan

7.2 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya telah dimutakhirkan lewat Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 beserta indikator dan target kerjanya sebagaimana diperlihatkan pada Tabel berikut.